

STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA DALAM
MENGHADAPI KORUPSI

Yolanda Wulandari

Universitas Bandar Lampung

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis

Email : yolandawulandari257@gmail.com**ABSTRACT**

Corruption is a social phenomenon that undermines the integrity of the government and the country's economy, especially in Indonesia. The younger generation plays a strategic role in corruption prevention efforts. This research aims to analyze the young generation's awareness of corruption, awareness-raising strategies, and the role of technology and education in the fight against corruption. This research uses a qualitative approach with interviews as the main method of data collection. The results show that the level of awareness of young people about corruption is quite high, but there are still challenges in practical application and active involvement in anti-corruption activities. This research recommends strengthening anti-corruption education, the role of youth organizations, and the use of social media to increase awareness and involvement of the younger generation in efforts to eradicate corruption.

Keywords: Corruption; Youth Awareness; Anti-Corruption Education; Role Of Technology; Youth Organizations; Indonesia

ABSTRAK

Korupsi merupakan fenomena sosial yang merusak integritas pemerintah dan ekonomi negara, terutama di Indonesia. Generasi muda memegang peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran generasi muda terhadap korupsi, strategi peningkatan kesadaran, dan peran teknologi serta pendidikan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran generasi muda tentang korupsi cukup tinggi, tetapi masih ada tantangan dalam penerapan praktis dan keterlibatan aktif dalam kegiatan antikorupsi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan antikorupsi, peran organisasi pemuda, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Kesadaran Generasi Muda; Pendidikan Anti-Korupsi; Peran Teknologi; Organisasi Pemuda; Indonesia

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.36
5

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang sering kali melibatkan pejabat publik dan sektor swasta. Salah satu indikator yang menunjukkan situasi korupsi di Indonesia adalah **Indeks Persepsi Korupsi (IPK)**. Pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34, yang menunjukkan stagnasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115 di antara negara-negara lain. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Korupsi sebagai suatu fenomena hukum yang sangat membahayakan kelangsungan negara, mengganggu kewibawaan negara, serta merugikan perekonomian maupun keuangan negara tidak boleh biarkan berkembang biak dan merajalela sampai memasuki semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk segera melakukan pemberantasan sampai keakar-akarnya.¹

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang merusak tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa dan pencegahan korupsi. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa bertanggung jawab dalam Korupsi di Indonesia dapat digambarkan sebagai penyakit sosial yang telah mengakar kuat dalam sistem pemerintahan dan masyarakat.

Menurut penelitian, korupsi telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu: - Tahap elitis- Tahap endemik- Tahap sistemik. Pada tingkat elit, praktik korupsi terjadi di kalangan pejabat tinggi. Pada tahap endemik, korupsi menyebar ke masyarakat luas, dan pada tahap sistemik, korupsi menjadi bagian dari budaya dan perilaku sehari-hari.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional.² Selain itu, korupsi juga melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat. Ketidakadilan sosial semakin meningkat, di mana kelompok elite mendapatkan akses lebih baik terhadap sumber daya publik sementara masyarakat miskin terpinggirkan.

Dampak korupsi terhadap masyarakat sangat nyata. Pertama, korupsi menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik. Masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, sehingga menurunkan partisipasi politik dan kepercayaan sosial. Kedua, korupsi memperburuk kondisi ekonomi dengan meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin serta menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiga, dampak psikologis seperti kebencian sosial terhadap para pelaku korupsi juga muncul, menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat.

Dalam memberantas tindak kejahatan korupsi bukan hanya menjadi beban bagi pemerintah dan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat

¹ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati. 2022. Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di sekretariat DPRD tulang bawang. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3. No.2. hlm 8-9.

² (Alfarizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, 2021). implemtasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang di lakukan oleh oknum mantan kepala kampung menang jaya. *hukum* Vol.1, No.3, hlm.8-9.

untuk menyelamatkan masa depan bangsa.³ Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan korupsi. Mereka dapat mendorong perubahan positif melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Misalnya, mereka dapat mengorganisir kampanye anti korupsi, menyebarkan kesadaran tentang dampak korupsi, dan mendorong transparansi dalam pemerintah. Berdasarkan sejarah, pemuda sering kali menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial seperti, yang kita tau dalam pergerakan reformasi tahun 1998. Dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai integritas dan etika, generasi muda dapat membantu membangun budaya anti-korupsi di masyarakat.

Selain itu, keterlibatan aktif generasi muda dalam politik sangat penting. Generasi muda perlu didorong untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Keterlibatan mereka dalam politik tidak hanya memberikan suara bagi kepentingan mereka tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan organisasi politik, pemuda dapat berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Generasi muda juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang praktik-praktik korupsi dan menggalang dukungan untuk gerakan anti-korupsi. Media juga dapat berperan sebagai alat untuk mengekspos tindakan korupsi, sehingga masyarakat lebih waspada. Kampanye media sosial seperti #StopKorupsi di Instagram dan Twitter telah berhasil menarik perhatian generasi muda. Dengan menggunakan influencer dan konten kreatif, kampanye ini meningkatkan kesadaran tentang tindakan korupsi dan mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai upaya pemberantasan korupsi.

Fenomena korupsi di Indonesia merupakan tantangan serius yang memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat. Generasi muda memegang peranan penting dalam pembangunan negara dan pencegahan korupsi melalui pendidikan, partisipasi politik, dan penggunaan teknologi. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi, generasi muda dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menghadapi korupsi ?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Meningkatkan pemahaman generasi muda tentang korupsi
2. Mendorong sikap proaktif dalam pencegahan korupsi
3. Mengembangkan program pendidikan anti-korupsi yang efektif

³Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung Smpn 10 Metro yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor :32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)*. Sol Justicia. Vol. 5. No.2. Hlm. 194.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan kajian pustaka terkait kesadaran hukum dan korupsi.

V. PEMBAHASAN

A. Konsep Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Dari Bahasa Belanda itu lahirlah kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).⁴ Menurut UU No.20 tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibatkan merugikan Negara atau perekonomian Negara. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁵

Korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Korupsi Suap : Memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan jabatan.
2. Korupsi Penggelapan : Pengambilan atau penggunaan aset atau uang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi.
3. Korupsi Pungli (Pungutan Liar) : Pengambilan uang secara ilegal dari masyarakat.
4. Korupsi Kolusi : Kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk merugikan pihak lain atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.
5. Korupsi Nepotisme : Penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat dalam hal pekerjaan atau kontrak.
6. Korupsi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) : Praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
7. Korupsi dalam Pengadaan : Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara.

B. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi

Korupsi merupakan penghancur yang hebat terhadap sisi kehidupan bangsa, termasuk sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan rakyat. Korupsi mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Pertama, korupsi menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap investasi dan secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi yang meluas mengurangi kepercayaan investor baik dalam negeri maupun internasional, mengurangi arus investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga mengurangi tingkat investasi, karena investor cenderung memilih negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah, sehingga mengurangi investasi asing langsung (FDI), yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

⁴ WJS Poerwadarminta. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 524.

⁵Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 1. Hlm. 10.

Korupsi juga meningkatkan biaya produksi di sektor swasta dalam berbagai cara, termasuk mempersulit pengelolaan melalui pembayaran ilegal dan negosiasi dengan otoritas yang korup. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan tingginya biaya barang dan jasa, yang pada akhirnya membebani konsumen. Selain itu, korupsi sering kali menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, yang mengakibatkan tidak efisiennya penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur dan buruknya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun. Hal ini dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Praktik korupsi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat yang korup, sehingga mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak adil. Selain itu, korupsi mengurangi pendapatan pemerintah dari departemen pajak, mengurangi pendapatan pemerintah dan membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik, karena banyak pejabat pajak yang terlibat dalam praktik korupsi.

C. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial

Korupsi mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap pembangunan sosial di berbagai sektor. Pertama, korupsi melemahkan hukum dan tata kelola negara. Sistem hukum yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara menjadi rapuh ketika penegakan hukum tidak lagi dilakukan secara adil dan transparan. Ketika hukum dipermainkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, kepercayaan publik terhadap sistem hukum runtuh, dan ketidakpastian hukum pun tumbuh. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat, di mana masyarakat kehilangan rasa aman dan percaya pada lembaga-lembaga negara yang seharusnya melindungi mereka.

Dampak kedua dari korupsi adalah pada peningkatan kemiskinan. Korupsi sering kali mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan. Anggaran yang ditujukan untuk infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin terhambat, dan ketimpangan sosial semakin melebar. Sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru diselewengkan, membuat kemiskinan menjadi semakin sulit untuk diatasi.

Selain itu, korupsi juga mencemarkan nama baik suatu negara di mata internasional. Negara yang memiliki reputasi tinggi dalam hal korupsi cenderung dipandang negatif oleh dunia internasional. Hal ini mengakibatkan penurunan minat dari investor asing yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Para investor cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena mereka khawatir akan keamanan investasinya, sehingga mengurangi aliran modal asing yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.

Tidak kalah penting, korupsi menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan berbagai program pembangunan. Melemahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat ini bisa menciptakan siklus negatif di mana pemerintah semakin jauh dari rakyat, dan pembangunan sosial semakin tertinggal. Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya

korupsi antara lain: aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.⁶

D. Tingkat Kesadaran Generasi Muda

Secara umum, generasi muda memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi mengenai korupsi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, pengetahuan tentang korupsi di kalangan mereka cukup baik, sebagian besar generasi muda memahami definisi korupsi, berbagai jenisnya, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Mereka menyadari bahwa korupsi merugikan negara, menghambat pembangunan, dan menunjukkan komitmen mereka; banyak dari mereka yang aktif terlibat dalam berbagai aksi, seperti demonstrasi, petisi online, atau bergabung dengan organisasi yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Media sosial pun menjadi platform yang efektif bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Namun, di balik kesadaran yang tinggi tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesadaran teoritis versus praktis, meskipun banyak dari mereka memahami konsep korupsi secara teoritis, dalam praktiknya seringkali sulit untuk mengubah perilaku koruptif di lingkungan sekitar. Selain itu, ada juga fenomena apatisisme di antara sebagian generasi muda yang merasa bahwa upaya mereka tidak akan memberikan dampak signifikan dalam memberantas korupsi. Terakhir, kurangnya pemahaman mendalam tentang akar masalah korupsi menjadi tantangan lain; meskipun mereka sadar akan adanya korupsi, banyak yang belum memahami mekanisme kerja sistem yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Dengan demikian, meskipun generasi muda menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap isu korupsi, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan tindakan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran

Analisis tingkat kesadaran generasi muda mengenai korupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendidikan, media sosial, dan lingkungan keluarga. Berikut adalah analisis yang lebih spesifik tentang setiap faktor:

1. Pendidikan

Secara terminology, pendidikan berasal dari kata *paideia* (pedagogi), artinya pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang berbudaya dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat⁷ Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang korupsi. Pendidikan formal dan non-formal dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap korupsi, sehingga anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang korupsi.

⁶Zeni Zaenal Mutaqin, Ed. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Media Sains Indonesia. Bandung. Hlm. 179.

⁷ I Gusti Ketut Ariawan. 2018. *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3. No. 1. Hlm.23.

2. Media Sosial

Media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran generasi muda tentang korupsi. Sisi positifnya, media sosial dapat menyebarkan informasi tentang korupsi dan pentingnya anti-korupsi. Dampak Negatif : Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat mengurangi kesadaran tentang korupsi. Misalnya, konten yang tidak akurat atau berita palsu dapat menyesatkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi tentang korupsi.

3. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran anak tentang korupsi. Keluarga yang memiliki nilai-nilai yang kuat tentang integritas dan transparansi dapat meningkatkan kesadaran anak tentang pentingnya menghindari korupsi. Keluarga yang mendidik anak dengan baik dan memberikan contoh perilaku yang baik dapat membantu anak mengembangkan sikap yang positif terhadap anti-korupsi.

Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda akan mengemban nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.⁸ Kesadaran generasi muda tentang korupsi dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor pendidikan, media sosial, dan lingkungan keluarga. Pendidikan yang berkualitas, penggunaan media sosial yang bijak, dan lingkungan keluarga yang mendidik dapat meningkatkan kesadaran anak tentang korupsi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dan lingkungan keluarga yang tidak mendidik dapat mengurangi kesadaran tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui pendidikan yang efektif dan penggunaan media sosial yang akurat, serta memastikan bahwa lingkungan keluarga memberikan contoh perilaku yang baik.

B. Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda

Peningkatan kesadaran generasi muda akan bahaya korupsi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: "Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi."⁹

Melalui kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran yang kreatif, generasi muda dapat memahami konsep korupsi, dampak negatifnya bagi masyarakat, serta nilai-nilai integritas yang harus dijunjung tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, dan game edukasi, dapat membuat pesan antikorupsi lebih menarik dan mudah diakses oleh generasi muda. Keterlibatan aktif generasi muda dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat sekolah, komunitas, maupun pemerintahan, akan memupuk rasa memiliki dan tanggung jawab mereka dalam memberantas korupsi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga antikorupsi dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum. Dukungan masyarakat, termasuk generasi muda, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang

⁸ Ibid hal 24

⁹ Nepsianus, Max. *Hukum Pemberantasan Tindak Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. 1st ed. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI)

berintegritas, memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi, dan berperan aktif dalam membangun bangsa yang bersih dari korupsi.

Beberapa poin tambahan yang dapat dielaborasi lebih lanjut:

- a) Pentingnya peran keluarga dan lingkungan: Keluarga dan lingkungan terdekat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat perlu menjadi role model yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas.
- b) Kolaborasi lintas sektor: Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan media massa.
- c) Pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan: Program-program pendidikan antikorupsi perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda:

- 1) Lomba debat, essay, atau karya seni dengan tema antikorupsi.
- 2) Workshop atau seminar yang menghadirkan narasumber inspiratif dari berbagai latar belakang.
- 3) Kunjungan ke lembaga antikorupsi untuk melihat langsung proses kerja mereka.
- 4) Pembentukan klub antikorupsi di sekolah atau komunitas.
- 5) Kampanye antikorupsi di media sosial menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan visual yang menarik.

Berbagai inisiatif telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang korupsi. Berikut adalah beberapa contoh sukses dari inisiatif tersebut:

a. Program Sosialisasi di SMA Cerdas Mandiri

Salah satu inisiatif yang berhasil adalah program sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan di SMA Cerdas Mandiri. Melalui kegiatan ini, siswa diberikan edukasi tentang korupsi dan pentingnya integritas. Hasilnya, siswa menjadi lebih termotivasi untuk menolak segala bentuk korupsi dan mengembangkan sikap moral yang kuat.

b. Kantin Anti Korupsi

Inisiatif lain adalah pengembangan program kantin anti korupsi yang diterapkan di berbagai sekolah. Program ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku anti koruptif. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan tentang nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

c. Gerakan Pemuda Pemuda Muhammadiyah dan Madrasah Antikorupsi

Organisasi Pemuda Muhammadiyah telah meluncurkan gerakan "Berjamaah Lawan Korupsi" dengan mendirikan "Madrasah Antikorupsi" di beberapa kota. Madrasah ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda. Dalam waktu enam bulan, mereka berhasil mendirikan empat madrasah di berbagai daerah, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter anti koruptif.

d. Gerakan Sosial oleh Kaum Muda

Kaum muda juga berpartisipasi dalam gerakan sosial antikorupsi, meluncurkan berbagai kampanye dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka menggunakan

media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan masyarakat. Melalui program pendidikan dan gerakan sosial, generasi muda tidak hanya menjadi penerus negara, tetapi juga agen perubahan yang mampu melawan korupsi secara efektif.

VI. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam upaya antikorupsi di Indonesia. Korupsi merupakan fenomena sosial dan hukum yang merugikan kesehatan suatu negara dan merugikan perekonomian, serta merupakan masalah sistemik di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun kesadaran generasi muda terhadap korupsi relatif tinggi, namun masih terdapat tantangan besar dalam melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan antikorupsi. Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran di kalangan generasi muda adalah pendidikan, lingkungan keluarga, dan media sosial. Pendidikan formal dan nonformal jika dirancang dengan baik dapat memperkuat pemahaman generasi muda tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas.

Media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait kampanye antikorupsi, namun jika tidak digunakan secara bijak dapat menyesatkan dan menurunkan kredibilitas pesannya. Selain itu, lingkungan keluarga juga menjadi landasan pertama bagi pengembangan kepribadian antikorupsi. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas pada anak-anaknya turut menciptakan generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi dan pentingnya pemberantasannya. Namun tantangan juga muncul dari fenomena sikap apatis sebagian generasi muda yang merasa upayanya tidak memberikan dampak signifikan dalam pemberantasan korupsi. Kajian ini juga menemukan bahwa partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan politik dan sosial mempunyai potensi besar dalam pemberantasan korupsi.

Melalui pemanfaatan teknologi, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai inisiatif antikorupsi di media sosial dan program kesadaran antikorupsi di sekolah. Sekalipun generasi muda memahami pentingnya integritas, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong mereka agar lebih terlibat dalam tindakan nyata melawan korupsi, baik melalui partisipasi politik dan sosial maupun melalui organisasi pemuda.

Secara keseluruhan, meningkatkan kesadaran akan korupsi di kalangan generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan menggabungkan strategi seperti pendidikan, peran keluarga, dan teknologi, generasi muda dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membangun masa depan yang lebih bersih dan inklusif.

VII. SARAN

1. Penguatan pendidikan antikorupsi:

Pendidikan formal dan nonformal hendaknya lebih menekankan pentingnya integritas dan transparansi. Kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran kreatif dapat membantu generasi muda lebih memahami dampak negatif korupsi.

2. Pemanfaatan teknologi dan media sosial:

Kampanye antikorupsi melalui media sosial perlu lebih diperkuat. Dengan memanfaatkan influencer, konten kreatif, dan platform digital, kami dapat menjangkau lebih banyak generasi muda dan memotivasi mereka untuk aktif memerangi korupsi.

3. Peran keluarga dan lingkungan:

Lingkungan keluarga dan masyarakat berperan penting dalam membentuk karakter antikorupsi. Orang tua dan tokoh masyarakat harus memberi contoh dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

4. Keterlibatan aktif dalam politik dan isu-isu sosial:

Generasi muda perlu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Partisipasi dalam organisasi sosial dan politik membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Kerjasama lintas sektoral:

Upaya pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan media massa. Program pendidikan antikorupsi juga perlu dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala untuk meningkatkan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Balaku Jindak Pidana. Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan. Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Meganga Jaya (Studi Kasus Nomor 13/Pid Sus-Tpk/2020/Pn. Jik) *IBLAM Law Review*, Vol. 1 No 3
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati. (2022). Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan pindak pidana korupsi di sekretariat DPRD tulang bawang Hukum. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No.2
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan. Heru Budi Khumiawan. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitas gedung Smpn 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi Putusan Nomor 32/Pid Sus-Tpk/2021/PN. *sol justicia*, vol. 5 No. 2
- Bambang Hartono. Zainudin Hasan. Wilsa Syahira. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1
- I Gusti Ketut Ariawan, Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 3, no 1. 2018
- Nepsianus, Max. (n.d.). *Hukum Pemberantasan Tindak Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI)
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2021 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*
- Wilhelmus, Ola Rongan. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak dan penanganannya. *JPAK Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Jil.17 No.9
- Zeni Zaenal Mutaqin, ed. (2022). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia